

PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DI INDONESIA

Wahyudin Hasyim¹, Abdul Pattawe², Muhammad Din³, Andi Chairil Furqan⁴, Megawati⁵

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

⁵Badan Penelitian dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia

e-mail: Wahyudin.Hasyim2@gmail.com, abdulpattawe@gmail.com, muhammaddin@untad.ac.id, andichairilfurqan@untad.ac.id, megawatidaris@gmail.com

Diterima: 12-10-2024 Disetujui: 17-12-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas keuangan daerah dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam meningkatkan kemandirian daerah. Penelitian menggunakan sampel dari 542 pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota selama tahun 2018-2021 dengan total observasi sebesar 2.168. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah. Sementara itu, SPIP yang kuat juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemandirian daerah, menandakan bahwa penguatan pengendalian internal dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pemerintah daerah membuat dan menjalankan kebijakan untuk mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan pengelolaan keuangan sebagai strategi untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan Daerah; SPIP; Kemandirian Daerah.

Abstract

This research aims to analyze the influence of regional financial accountability and the effectiveness of the Government Internal Control System (SPIP) in increasing regional independence. Using 542 regional government data consisting of Provinces/Districts/Cities during 2018-2021 with a sample of 2,168 observations. The results of this research show that regional financial accountability has a positive effect on regional independence, where increasing financial accountability contributes to increasing regional independence. Meanwhile, a strong SPIP also contributes significantly to regional independence, indicating that strengthening internal control can increase the efficiency and effectiveness of regional financial management. This research has implications for the importance of regional governments creating and implementing policies to realize accountability and improve financial management as a strategy to increase regional independence.

Keywords : *Accountability; Government Internal Control System; Regional Independence*

Pendahuluan

Salah satu aspek penting pelaksanaan kewenangan otonomi daerah adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan potensi penerimaan daerah. Tujuan kemandirian daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan kemampuan keuangan yang berasal dari daerah lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dana pemerintah pusat. Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus memperkuat akuntabilitas keuangan daerah dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dapat menghentikan penyalahgunaan anggaran atau pengelolaan yang tidak patuh. Hal ini akan memungkinkan daerah untuk memaksimalkan potensi pendapatannya dan mengurangi ketergantungan mereka pada pendanaan pemerintah pusat dapat dicapai. Kemandirian daerah adalah kesanggupan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat. Kemandirian keuangan yang didasarkan pada seberapa baik sumber daya keuangan daerah dapat mendukung pembangunan daerah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemandirian tersebut (Nggilu et al., 2016). Menurut (Hendri & Utama, 2019) peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui pemberdayaan pajak dan retribusi, penguatan kewenangan daerah dan alokasi dana yang adil. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah, serta memungkinkan daerah untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Akuntabilitas mencakup penyajian, pelaporan, dan informasi kepada publik tentang semua tindakan dan masalah yang berada di bawah lingkup pemerintah (Wahyuningsih & Kiswanto, 2016). Sehingga, penelitian ini menganalisis bagaimana pemerintah berperan dalam mengawasi dan mengelola keuangan daerah demi pencapaian kemandirian daerah di Indonesia. Ketentuan membayar pajak dan retribusi harus sesuai dengan retribusi kebutuhan sumber daya lokal dan pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif, perluasan, dan pelayanan masyarakat mereka sendiri (Halim, 2007:232). Kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari pusat. Sebaliknya, daerah yang mandiri akan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Derajat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan mayoritas pendapatan daerah juga ditunjukkan dengan perbandingan kemandirian tersebut. Tingkat kesejahteraan sosial meningkat seiring dengan besarnya jumlah pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan penduduk (Halim, 2004:284). Kemandirian keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut (Groves et al., 1981:19) Unsur-unsur yang mempengaruhi kemandirian finansial terbagi dalam tiga kategori: masalah keuangan, kesejahteraan, dan lingkungan. Kemandirian finansial mengacu pada kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai operasi, pengembangan masyarakat, dan layanannya. Semakin mandiri keuangan daerah, ketergantungan pemerintah daerah pada sumber pendanaan luar akan berkurang (Akhmad et al., 2020).

Akuntabilitas keuangan daerah adalah sistem yang mengatur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi, tanggung jawab, dan efektivitas. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah mematuhi peraturan yang berlaku dan menyajikan informasi keuangan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam pemerintahan daerah, tanggung jawab keuangan daerah merupakan komponen penting yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang terbuka, akuntabel, dan andal (Hendrawan et al., 2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengawasi dana daerah yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat (Kholmi, 2017). Akuntabilitas keuangan daerah dapat diwujudkan melalui transparansi, partisipasi, dan responsivitas (Maju, 2020). Akuntabilitas akan mendorong masyarakat untuk berinvestasi di daerah tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian daerah. Akuntabilitas tidak hanya mencakup pemantauan organisasi secara

keseluruhan tetapi juga mengevaluasi tindakan individu dalam perannya, memastikan mereka memenuhi tanggung jawab pribadi mereka secara efektif (Jurana et al., 2022) Peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilakukan dengan pemantauan kualitas pelaporan keuangan yang optimal dan tepat sehingga pekerjaan pemerintah optimal (Agustina et al., 2024). Selain menjamin penggunaan dana publik yang transparan dan efektif, akuntabilitas daerah juga menjadi landasan perbaikan pengelolaan sumber daya daerah. Dengan demikian, daerah yang memiliki sistem akuntabilitas yang baik akan lebih mampu mengelola dan mengembangkan potensi lokal mereka, meningkatkan PAD, mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan, dan pada akhirnya, memperkuat kemandirian daerah dalam mendanai pembangunan mereka sendiri. Akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan salah satu komponen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Herlina et al., 2021). Akuntabilitas adalah suatu cara bagi telah dipercaya masyarakat atau individu dalam menjalankan tanggung jawabnya, seperti perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, untuk menentukan keberhasilan atau kegagalannya di masa depan (Dewi et al., 2019). Akuntabilitas dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana disebabkan oleh proses pertanggungjawaban yang diberikan pihak pemegang tanggung jawab atas dasar pengelolaan kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan harus dilaporkan kepada pihak pemberi wewenang (Dzulkipli et al., 2023).

Proses SPIP dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang memadai dengan tujuan organisasi akan tercapai dan kegiatan organisasi dilaksanakan dengan sukses dan efisien, dan bahwa data keuangan yang disediakan akurat dan dapat dipercaya. SPIP juga merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan kemandirian daerah. Sistem pengendalian internal yang baik akan membantu pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara efektif dan efisien. Hal ini akan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan keuangan, yang dapat menyebabkan kerugian bagi daerah. SPIP berfungsi sebagai sistem yang memastikan bahwa operasi pemerintah berjalan dengan efisien dan efektif, serta informasi keuangan yang disajikan akurat dan dapat dipercaya (Simon et al., 2016). Implementasi SPIP yang baik dapat mengurangi risiko penyimpangan keuangan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya publik (Pane, 2018). Menurut (Jurana et al., 2022), SPIP juga memastikan adanya evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap tindakan dan kebijakan pemerintah daerah, yang pada gilirannya mendukung tercapainya kemandirian daerah. Sebuah kebijakan internal organisasi, penerapan pengendalian internal berupaya untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat praktik tata kelola yang baik, khususnya akuntabilitas, dalam organisasi (Jatmiko et al., 2022). Latar belakang, pengalaman, bakat, dan kapasitas pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Utara yang beragam memaksa mereka untuk bekerja di bawah ekspektasi. Menjadi lebih transparan, akuntabel, tidak memihak, terukur, dan terlibat adalah beberapa tuntutan tersebut. Untuk meningkatkan kinerja dan mengatasi tantangan implementasi, sistem pengendalian internal pemerintah perlu diterapkan dengan baik (Hamid et al., 2022).

Menurut teori keagenan, agar pemerintah daerah dapat beroperasi demi kepentingan terbaik masyarakat, harus terdapat akuntabilitas yang tinggi dalam hubungan antara pemerintah pusat sebagai prinsip dan pemerintah daerah sebagai agen (Jensen & Meckling, 1976). Akuntabilitas yang kuat menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya publik, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan kekuasaan (Jensen, 2005)

Berdasarkan konsep di atas, kemandirian daerah, pengendalian intern dalam pemerintahan, dan akuntabilitas keuangan daerah, semuanya saling berhubungan. Sistem pengendalian internal pemerintah dan akuntabilitas keuangan daerah yang kuat akan mendorong kemandirian daerah. Untuk mencapai kemandirian daerah di Indonesia, penelitian ini secara eksplisit berupaya mengkaji peran pemerintah dalam mengawasi dan menata keuangan daerah. Dengan menggunakan data dari 542 pemerintah daerah yang terdiri dari

Provinsi/Kabupaten/Kota selama tahun 2018-2021, penelitian ini berfokus pada pengaruh akuntabilitas keuangan daerah dan efektivitas SPIP terhadap kemandirian daerah.

Artikel ini dibagi menjadi empat bagian yaitu tinjauan literatur dan perumusan hipotesis akan dibahas pada bagian kedua. Teknik penelitian akan dibahas pada bagian ketiga. Hasil pengujian hipotesis menjadi topik utama bagian keempat. Temuan penelitian, keterbatasan, dan rekomendasi untuk studi tambahan semuanya akan dibahas pada bagian kelima dan terakhir.

Agency Theory

Dengan gagasan mendasar bahwa agen adalah pihak yang memperoleh kekuasaan dan pemberi hibah adalah pihak yang memberikan kekuasaan, teori keagenan berpusat pada interaksi antara dua pihak. Penelitian ini menggambarkan teori keagenan dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara prinsipal dan agen sebanding dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Halim & Kusufi, (2012) menyatakan teori agensi adalah teori hubungan prinsipal dengan agen Jensen, (2005:13). Teori keagenan berkonsentrasi pada pengaturan kontrak antara prinsipal dan agen ketika investor atau pemilik bisnis menunjuk agen untuk mengelola organisasi atas nama pemilik. Teori keagenan Jensen & Meckling, (1976:305) menggambarkan hubungan kontraktual antara pihak yang memberikan kepercayaan (prinsipal) dengan pihak yang diberikan kepercayaan (agen). Dalam hal ini, pemerintah pusat adalah prinsipal yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah sebagai agen. Teori agensi menekankan pentingnya pengawasan dan pengelolaan yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan mendorong kemandirian daerah. Daerah otonom perlu memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk menjalankan pemerintahan, sementara kemandirian daerah tercermin dari berkurangnya ketergantungan finansial pada pemerintah pusat. Menurut Halim, (2007:232), kemandirian keuangan daerah yang didefinisikan sebagai otonomi fiskal, adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri operasional pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang signifikan. Menurut teori keagenan, kemungkinan konflik kepentingan dapat timbul dari hubungan prinsipal-agen. Pemerintah pusat berperan sebagai sumber kekuasaan dan pendanaan utama dalam konteks keuangan daerah. Dengan menjamin bahwa pemerintah daerah berwenang mengawasi sumber daya publik dan secara terbuka mengungkapkan bagaimana sumber daya tersebut digunakan, akuntabilitas keuangan daerah membantu mengatasi masalah ini. pemerintah pusat harus memiliki mekanisme untuk mengawasi dan memantau kinerja pemerintah daerah, baik melalui audit, laporan keuangan, maupun evaluasi program. Sistem pengendalian internal pemerintah bertujuan untuk mengurangi risiko pengelolaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan meningkatkan transparansi serta integritas dalam pengelolaan anggaran, sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah yang terwujud melalui akuntabilitas dan sistem pengendalian internal yang efektif.

Dalam teori agensi, kemandirian ini berfungsi sebagai insentif bagi pemerintah daerah untuk bertindak lebih efisien dalam mengelola keuangan dan sumber daya daerah, karena semakin tinggi kemandirian daerah, semakin besar fleksibilitas daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Kajian sebelumnya terkait Kemandirian Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Ermawati & Aswar, (2020) Hal tersebut menunjukkan bahwa "rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah". Penalaran di atas membawa pada kesimpulan bahwa kemampuan suatu daerah dalam membangun sumber daya keuangannya tercermin dari tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Daerah dituntut untuk lebih meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dalam rangka membiayai berbagai belanja daerah kepada pemerintah pusat juga harus dikurangi seiring dengan meningkatnya kemandirian daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat memperkuat dan meningkatkan kemandirian fiskal suatu daerah. Kemandirian ini mengacu pada kemampuan daerah untuk mendanai kegiatan dan pembangunan dengan sumber daya internalnya sendiri, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Rasmini & Masdiantini, 2018). Menurut studi Oktaviani & Sari, (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi kemandirian suatu daerah maka akuntabilitas pelaporan keuangan Akuntabilitas pelaporan keuangan suatu daerah meningkat seiring dengan tingkat independensinya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban keuangan, termasuk uang dan kekayaan daerah yang digunakan untuk melaksanakannya (Neltje Meini Rotinsulu et al., 2021). Oleh karena itu, diduga bahwa akuntabilitas keuangan daerah mempengaruhi kemandirian daerah. Adapun hipotesisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

H1 : Akuntabilitas Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kemandirian Daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap kemandirian daerah

SPIP dirancang dalam rangka pengawasan demi mencapai tujuan serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. SPIP diciptakan sebagai cara untuk melacak pencapaian tujuan dan menerapkan tata kelola yang baik. Mulai dari tingkat satuan kerja terkecil hingga individu, seluruh pimpinan pemerintahan mempunyai kewajiban bersama dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Sistem pengendalian ini bukan hanya bertujuan untuk menciptakan mekanisme administratif, tetapi juga untuk mengubah sikap dan perilaku aparatur desa. Peraturan yang ditetapkan adalah langkah awal menuju perbaikan. Oleh karena itu, Dedikasi, kepemimpinan, dan itikad baik seluruh aparatur pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan SPIP. Salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan guna mencapai pemerataan pembangunan dan kemandirian pengelolaan daerah adalah dengan diberlakukannya SPIP yang dituangkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 (Pane, 2018). Pengendalian internal yang baik mengarah pada efisiensi operasional yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya daerah. Pengelolaan yang efisien dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan hasil dari setiap anggaran yang dialokasikan, memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi kemandiriannya. Berdasarkan definisi tersebut, Sistem pengendalian internal pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan hukum (Simon et al., 2016). Oleh karena itu, diduga bahwa maturitas SPIP mempengaruhi kemandirian daerah. Adapun hipotesisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

H2 : SPIP berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah

Metode

Penelitian ini menggunakan data pemerintah daerah sejumlah 542 yang terdiri atas Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada tahun 2018-2021 dengan jumlah sampel sebesar 2.168 observasi tahun 2018-2021. Semua data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari instansi Pemerintah Indonesia, yaitu dari BPK dan BPKP dalam laporan kinerja untuk data maturitas SPIP.

Model Empiris dan Operasional Variabel

Untuk menjawab permasalahan penelitian dan sekaligus menguji hipotesis maka model empiris pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tingkat Kemandirian Daerah = β_0 _{it} + β_1 Akuntabilitas Keuangan Daerah + β_2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah + β_3 Ukuran Pemerintah Daerah + β_4 Umur Pemerintah Daerah + β_5 Letak Geografis Pemerintah Daerah + β_6 Status Pemerintah Daerah + e_{it} (1)

Deskripsi:

$\beta_1 - \beta_k$: Koefisien Regresi

e : Kesalahan

Variabel utama pada penelitian ini adalah Tingkat Kemandirian Daerah, Akuntabilitas Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Tingkat Kemandirian Daerah, merupakan indikator dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin mandiri suatu daerah maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah.

Akuntabilitas keuangan daerah, merupakan laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal atas LKPD yang diukur dengan variable ketegorical yaitu, "4" untuk WTP, "3" untuk WDP, "2" untuk TMP dan "1" untuk TW yang menjadi indikator dari transparansi daerah dalam mengelola keuangan daerah guna menunjang berjalannya system pemerintahannya.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, merupakan variable maturitas yang diukur menggunakan level 0-5. Level 0 menyatakan bahwa internal pemerintah belum memiliki kebijakan untuk melaksanakan praktek pengawasan internal, selanjutnya level 1 menyatakan bahwa sudah terdapat praktik pengendalian internal, namun belum terorganisir dengan baik mengenai pendekatan risiko serta pengendaliannya sehingga kelemahannya tidak dapat diidentifikasi, kemudian level 2 menegaskan bahwa meskipun langkah-langkah pengendalian internal telah dilaksanakan oleh pemerintah, namun langkah-langkah tersebut tidak terdokumentasi dengan baik, sebagian besar masih bergantung pada individu, tidak melibatkan satu unit organisasi, dan belum dinilai keefektifannya, sehingga meninggalkan banyak kelemahan yang tidak dapat diperbaiki. level 3 menyatakan bahwa internal pemerintah telah menjalankan praktik pengendalian internal dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasinya belum terdokumentasi secara memadai, kemudian level 4 menyatakan bahwa pengendalian internal, termasuk evaluasi dan dokumentasi, telah berhasil dilaksanakan. Laporan ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal pemerintah telah menerapkan teknik pengendalian internal yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang dibantu oleh aplikasi komputer untuk pemantauan otomatis.

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Letak Geografis Pemerintah Daerah Dan Status Pemerintah Daerah. Ukuran Pemerintah Daerah merupakan variable ukuran pemerintah daerah pada tahun yang diukur menggunakan logaritma natural (ln) nilai total asset. Umur Pemerintah Daerah, merupakan variable umur pemerintah daerah pada tahun 2018-2021 yang diukur menggunakan jumlah tahun pembentukan pemerintah daerah sampai dengan tahun 2022. Letak Geografis Pemerintah Daerah, merupakan variabel letak geografis pemerintah daerah yang diukur menggunakan dummy, yaitu "1" jika pemerintah daerah berada di pulau jawa, dan "0" lainnya. Status Pemerintah Daerah, merupakan variabel status pemerintah daerah yang diukur menggunakan dummy, yaitu yaitu "0" Pemerintah Kota, "1" Pemerintah provinsi, "2" secara umum dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1
Operasionalisasi Dan Sumber Data

Nama	Operasionalisasi Variabel	Sumber Data
Tingkat Kemandirian Daerah	Dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan pendapatan total, kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai operasional mereka sendiri tanpa bantuan sumber luar, seperti pemerintah federal, dievaluasi.	Badan Pemeriksa keuangan (BPK)
Akuntabilitas Keuangan Daerah	Laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal atas LKPD yang diukur dengan variable kategorikal yaitu, "4" untuk WTP, "3" untuk WDP, "2" untuk TMP dan "1" untuk TW	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Maturitas SPIP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ukuran Pemerintah Daerah	Ukuran Pemerintah Daerah tahun 2018-2021, diukur dengan logaritma natural (Ln) total aset Pemerintah Daerah.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Umur Pemerintah Daerah	Umur pemerintah Daerah tahun 2018-2021, diukur dengan jumlah tahun sejak pembentukan pemerintah daerah sampai dengan tahun 2018-2021.	Kementerian Dalam Negeri.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Gambaran statistik deskriptif variabel pada penelitian ini secara umum lengkap dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel

Variables	Mean	Std. Dev	Min	Max
Tingkat Kemandirian Daerah	13.53	11.86	0.08	87.27
Akuntabilitas Keuangan Daerah	3.85	0.44	1	4
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	2.39	0.748	0	3
Ukuran Pemerintah Daerah*)	28.72	0.76	24.64	33.93
Umur Pemerintah Daerah	42.67	23.99	4	71
Status Pemerintah Daerah	0.29	0.57	0	2
Letak Geografis Pemerintah Daerah	0.21	0.41	0	1

Number of Observations = 2,168

Explanation of variable operationalization in table 1

*) In billions of rupiah

Sumber; Data sekunder, Output STATA (Diolah, 2023)

Tabel 2 menjelaskan statistik deskriptif untuk seluruh variabel yang dianalisis dalam penelitian ini. Tingkat Kemandirian Daerah, yang merepresentasikan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah, memiliki nilai rata-rata sebesar 13.53, dengan rentang antara 0.08 hingga

87.27. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang relatif rendah selama periode penelitian 2018-2021. Rata-rata ini mengindikasikan adanya ketergantungan yang signifikan pada bantuan pemerintah pusat, terutama bagi daerah dengan nilai Tingkat Kemandirian Daerah yang mendekati minimum. Mean variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3.85, dengan rentang 1 hingga 4. Ini berarti mayoritas pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian ini telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan mereka dianggap akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini WTP yang dominan mencerminkan adanya komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Mean SPIP, variabel ini memiliki rata-rata sebesar 2.39, yang berarti sebagian besar pemerintah daerah berada pada level maturitas SPIP antara level 2 hingga 3. Level ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada praktik pengendalian internal, implementasinya masih belum terdokumentasi dengan baik (level 2), atau sudah terdokumentasi dengan baik namun evaluasinya belum memadai (level 3). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan pengendalian internal pemerintah daerah agar dapat mencapai level yang lebih tinggi, yang mencerminkan pengendalian yang efektif dan berkelanjutan.

Berbeda dengan itu, Ukuran Pemerintah Daerah memiliki rata-rata sebesar 28.72, yang mencerminkan total aset pemerintah daerah sekitar 2,872 miliar rupiah. Variasi yang cukup besar dalam total aset ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam skala operasi dan kapasitas fiskal antar daerah. Sementara itu, Umur Pemerintah Daerah memiliki rata-rata sebesar 42.67 tahun, yang mengindikasikan bahwa rata-rata usia pemerintah daerah yang digunakan sebagai sampel adalah sekitar 42 tahun. Ini menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah memiliki pengalaman dalam pengelolaan daerah otonom yang relatif cukup matang. Sedangkan variabel Letak Geografis Pemerintah Daerah dan variabel Status Pemerintah Daerah, dengan rata-rata masing-masing 0.21 dan 0.29, menunjukkan bahwa sebagian besar sampel penelitian berasal dari pemerintah daerah di luar Pulau Jawa dan memiliki status sebagai kabupaten. Ini mencerminkan distribusi geografis yang luas dari sampel dan dapat menunjukkan perbedaan karakteristik ekonomi dan administratif antara daerah-daerah di Jawa dan di luar Jawa, serta antara kabupaten dan kota/provinsi. Tabel 3 menunjukkan analisis korelasi antara variabel-variabel utama dalam penelitian ini, seperti Tingkat Kemandirian Daerah, Akuntabilitas Keuangan Daerah, SPIP, Umur Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Letak Geografis Pemerintah Daerah. Korelasi ini membantu untuk memahami hubungan antar variabel dan bagaimana setiap variabel mempengaruhi variabel lainnya.

Pada tabel 3 menjelaskan Korelasi antara tingkat kemandirian daerah dan Akuntabilitas Keuangan Daerah (0.164): Korelasi positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa semakin baik opini audit keuangan (Akuntabilitas Keuangan Daerah) yang diperoleh oleh pemerintah daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut (Tingkat Kemandirian Daerah). Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) cenderung mencerminkan pengelolaan keuangan yang lebih baik, yang berkontribusi pada kemandirian fiskal daerah. Korelasi antara Tingkat Kemandirian Daerah dan SPIP (0.200): Terdapat korelasi positif dan signifikan antara Tingkat Kemandirian Daerah dan SPIP, yang mengindikasikan bahwa peningkatan maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) berkaitan dengan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Hal ini menyiratkan bahwa sistem pengendalian internal yang lebih canggih dan kuat dapat menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan, pada akhirnya, kemandirian fiskal. Korelasi antara SPIP dan Akuntabilitas Keuangan Daerah (0.209): Korelasi positif antara variabel maturitas SPIP dan opini audit keuangan menunjukkan bahwa area dengan sistem pengendalian internal yang lebih kuat biasanya menerima kesimpulan audit yang lebih

baik. Hal ini menggaris bawahi pentingnya pengendalian internal yang efektif dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Tabel 3
Analisis Korelasi Variabel

Variabel	Tingkat Kemandirian Daerah	Akuntabilitas Keuangan Daerah	SPIP	Ukuran Pemerintah Daerah	Umur Pemerintah Daerah	Status Pemerintah Daerah	Letak Geografis Pemerintah Daerah
Tingkat Kemandirian Daerah	1,000						
Akuntabilitas Keuangan Daerah	0.164** (0.000)	1,000					
SPIP	0.200*** (0.000)	0.209*** (0.000)	1,000				
Ukuran Pemerintah Daerah	0.716*** (0.000)	0.129*** (0.000)	0.156*** (0.000)	1,000			
Umur Pemerintah Daerah	0.359*** (0.000)	0.150*** (0.000)	0.244*** (0.000)	0.384*** (0.000)	1,000		
Status Pemerintah Daerah	0.627*** (0.000)	0.103*** (0.000)	0.047*** (0.000)	0.476*** (0.000)	0.087*** (0.000)	1,000	
Letak Geografis Pemerintah Daerah	0.382*** (0.000)	0.124*** (0.000)	0.251*** (0.000)	0.361*** (0.000)	0.456*** (0.000)	0.043** (0.042)	1,000

Number of observations = 2168

Explanation of Operational Variables in Table 1

*** and ** = significant p-value 1% and 5%

Sumber; Data sekunder, Output STATA (Diolah, 2023)

Kemandirian Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah (0.716): Korelasi yang sangat tinggi dan signifikan antara Tingkat Kemandirian Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah (diukur berdasarkan total aset) memiliki hubungan positif yang kuat dengan kemandirian fiskal. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dengan aset yang lebih besar cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat, yang dapat digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah tanpa bergantung pada bantuan eksternal. Korelasi antara Tingkat Kemandirian Daerah dan Umur Pemerintah Daerah (0.359): Korelasi positif dan signifikan antara Tingkat Kemandirian Daerah dan Umur Pemerintah Daerah mengindikasikan bahwa usia pemerintah daerah berhubungan dengan tingkat kemandirian fiskal. Pemerintah daerah yang lebih lama berdiri (berusia lebih tua) cenderung memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi. Ini dapat disebabkan oleh pengalaman yang lebih panjang dalam mengelola sumber daya keuangan dan mengembangkan kapasitas administratif. Korelasi antara Tingkat Kemandirian Daerah dan Letak Geografis Pemerintah Daerah (0.382): Korelasi positif ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara lokasi geografis pemerintah daerah (Letak Geografis Pemerintah Daerah) dan tingkat kemandirian fiskal. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa (yang ditandai dengan nilai Letak Geografis Pemerintah Daerah yang lebih tinggi) tampaknya menunjukkan kemandirian fiskal yang lebih tinggi. Ini mungkin mencerminkan perbedaan dalam kebijakan fiskal, prioritas pengembangan, atau akses terhadap sumber daya lokal. Korelasi antara Tingkat Kemandirian Daerah dan Status Pemerintah Daerah (0.627): Hubungan positif yang substansial ini

menunjukkan adanya hubungan antara tingkat kemandirian fiskal dan kedudukan administratif pemerintah kota (Status Pemerintah Daerah). Daerah yang memiliki status kabupaten atau kota mungkin memiliki karakteristik pengelolaan keuangan dan prioritas pembangunan yang berbeda dibandingkan dengan daerah dengan status administrasi yang lebih tinggi seperti provinsi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode random effect dengan program software STATA-. Adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4
Hasil pengujian hipotesis

Tingkat Kemandirian Daerah = $\beta_0_{it} + \beta_1$ Akuntabilitas Keuangan Daerah + β_2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah+ β_3 Ukuran Pemerintah Daerah _{it} + β_4 Umur Pemerintah Daerah + β_5 Letak Geografis Pemerintah Daerah+ β_6 Status Pemerintah Daerah + e_{it}		
	Expected Sign	Tingkat Kemandirian Daerah _{it}
_CONS		-185.37*** (0.000)
Akuntabilitas Keuangan Daerah	H1 : (+)	0.686*** (0.001)
SPIP	H2 : (+)	0.804*** (0.000)
Umur Pemerintah Daerah	+/-	0.034*** (0.000)
Status Pemerintah Daerah	+/-	8,343*** (0.000)
Letak Geografis Pemerintah Daerah	+/-	4,694*** (0.000)
Ukuran Pemerintah Daerah	+/-	6,590*** (0.000)
Prob > F		0,000
R-square		0.662
Obs		2,168
Mean Vif		1.32

Information:

Explanation of variable operationalization in table 1

*** significant P-Value 1%

Data sekunder, STATA output (Diolah, 2023)

Secara umum hasil pengujian regresi linear berganda dengan menggunakan random effect menunjukan R-Square sebesar 0.662, model penelitian ini dapat menjelaskan 66,2 persen variasi peningkatan kemandirian daerah dengan signifikan (nilai F) 1 persen dan mean VIF sebesar 1.32, sehingga dapat dikatakan bahwa model tidak memiliki masalah multikoleniaritas dan andal untuk digunakan dalam menjelaskan variasi peningkatan kemandirian daerah di indonesia.

Tabel 4 menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas keuangan daerah terhadap kemandirian daerah dengan koefisien sebesar 0.686 pada level signifikan 1 persen. koefisien positif dan signifikan pada variabel akuntabilitas keuangan daerah menunjukkan bahwa opini audit keuangan yang lebih baik (misalnya, WTP) berhubungan dengan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Dengan kata lain, setiap peningkatan kategori

opini audit keuangan sebesar satu unit (misalnya, Wajar Dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian) cenderung meningkatkan kemandirian fiscal sebesar 0.686 unit. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini mendukung H1 bahwa akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah. Selanjutnya tabel 4 juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap peningkatan kemandirian daerah dengan koefisien sebesar 0.804 pada level signifikan 1 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat maturitas SPIP yang lebih tinggi terkait dengan peningkatan kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini mendukung H2 bahwa SPIP Berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah. Terkait dengan keberadaan variabel kontrol umur pemerintah daerah, letak geografis pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian daerah pada level signifikan sebesar 1 persen.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan diambil dengan transparansi dan integritas. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, yang penting untuk kemandirian daerah. Sedangkan SPIP berfungsi sebagai kerangka untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pedoman terkait. Sistem ini membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko, serta meningkatkan pengambilan keputusan di pemerintah daerah. Implementasi SPIP yang efektif dapat meningkatkan kinerja daerah dalam pengelolaan sumber dayanya, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kemandirian daerah. Dengan demikian, akuntabilitas dan SPIP merupakan aspek penting dalam menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu mengelola sumber dayanya secara efektif.

Dalam hubungannya dengan teori yang diterapkan, dimana teori keagenan yang berfokus pada hubungan antara prinsipal (pemegang kepentingan atau rakyat) dan agen (pemerintah daerah). Dalam teori keagenan, akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa agen (pemerintah daerah) bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (masyarakat). Akuntabilitas menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, ini menjamin bahwa pemerintah daerah beroperasi dengan cara yang sejalan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, SPIP berperan dalam memonitor dan mengendalikan tindakan pemerintah daerah, memastikan bahwa mereka mengelola sumber daya dengan efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian kemandirian daerah dalam teori keagenan dapat dilihat sebagai pemberian kepercayaan kepada agen (pemerintah daerah) untuk membuat keputusan dan mengelola sumber daya secara mandiri. Ini mengasumsikan bahwa pemerintah daerah, dengan pengetahuan lokal yang lebih baik dan pemahaman kebutuhan masyarakat, dapat bertindak lebih efisien dan efektif. Namun, kemandirian ini harus diimbangi dengan akuntabilitas dan kontrol yang kuat untuk mencegah penyimpangan dari kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, dalam teori keagenan, akuntabilitas, SPIP, dan kemandirian daerah saling terkait berperan penting dalam memastikan bahwa pemerintah daerah bertindak secara bertanggung jawab dan sejalan dengan kepentingan masyarakat yang mereka layani. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dan pengendalian internal yang efektif sebagai sarana untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka dengan cara yang sejalan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji bagaimana akuntabilitas berfungsi dalam kerangka pengendalian internal pemerintah dan sejauh mana hal tersebut mempengaruhi pencapaian kemandirian daerah di Indonesia. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menetapkan standar pelaksanaan audit internal pemerintah, khususnya pemerintah provinsi

dan kabupaten/kota, serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencapai kemandirian daerah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab keuangan daerah meningkatkan efisiensi sistem pengendalian internal pemerintah berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dalam penelitian ini. Efektivitas sistem pengendalian internal Pemerintah Kabupaten/Kota akan meningkat seiring dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah baik berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Oleh karena itu, pembentukan sistem pengendalian internal pemerintahan yang efisien dan kedudukan yang ideal bagi akuntabilitas keuangan daerah sangat penting untuk meningkatkan otonomi daerah dalam Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap kemandirian daerah dapat dijelaskan sebagai berikut. Sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara efektif dan efisien. Hal ini dapat memperbesar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Selain itu, sistem pengendalian internal yang efektif juga berfungsi untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran, sehingga anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah.

Implikasi Penelitian

Hasil analisis ini dapat menjadi dasar dalam merancang strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kemandirian daerah, melalui peningkatan akuntabilitas dan SPIP. System pengendalian internal pemerintah yang baik meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dapat membantu pemerintah daerah memastikan bahwa anggaran digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dapat didorong oleh akuntabilitas keuangan daerah yang kuat. Pemerintah daerah akan lebih termotivasi untuk membuat keputusan anggaran yang bijaksana dan sebagai hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut, temuan penelitian ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan perwakilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan dan diklat. Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal melalui peningkatan maturitas SPIP. Ini mencakup langkah-langkah seperti penguatan kontrol internal, penetapan standar operasional prosedur yang jelas, dan penggunaan teknologi untuk pengawasan keuangan yang lebih efektif.

Menyediakan rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pengendalian internal, seperti pelatihan yang lebih intensif untuk aparat pemerintah daerah, implementasi teknologi informasi untuk transparansi anggaran, dan pengawasan eksternal yang lebih ketat. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas dan tanggung jawab keuangan SPIP bermanfaat bagi otonomi daerah. Dengan demikian, langkah-langkah yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat mekanisme pengendalian internal dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalnya, dengan menerapkan pelatihan intensif bagi aparat pemerintah daerah mengenai tata kelola keuangan yang baik dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas data keuangan.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yaitu untuk mengukur tingkat kemandirian daerah dengan berfokus pada efektivitas SPIP dan akuntabilitas keuangan daerahnya, belum menganalisis lebih detail faktor-faktor lain seperti kurangnya sumber daya kompetensi, dan independensi yang sekiranya berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah. Pengukuran variabel kemandirian daerah hanya didasarkan pada indikator fiskal tertentu, seperti pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan. Penggunaan indikator lain yang lebih

komprehensif mungkin dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kemandirian daerah.

Penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel utama, yaitu akuntabilitas keuangan daerah dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dalam menganalisis kemandirian daerah. Variabel lain yang mungkin relevan, seperti faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tidak dieksplorasi secara mendalam, sehingga hasil penelitian mungkin tidak mencakup seluruh aspek yang mempengaruhi kemandirian daerah. Hal ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi faktor-faktor ini. Penelitian ini tidak mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan, efektivitas SPIP, dan kemandirian daerah selama periode penelitian. Pandemi ini mungkin berdampak besar pada pengelolaan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah. Akses data yang digunakan berasal dari sumber-sumber resmi pemerintah, yang terkadang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal keakuratan atau keterkinian data. Kesalahan dalam pelaporan data oleh pemerintah daerah atau kesalahan pengumpulan data dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian.

Rekomendasi

Penelitian selanjutnya diharapkan akan meneliti mengenai bagaimana pengaruh faktor lainnya seperti faktor keuangan maupun non keuangan terhadap kemandirian daerah secara lebih luas dan mendalam. Penelitian selanjutnya dapat meningkatkan tingkat keakuratan hasil penelitian dengan memperpanjang waktu penelitian dan rentang waktu penelitian ini adalah tahun 2018-2021 peneliti selanjutnya dapat menambahkan rentang waktu hingga tahun 2022 dan menunjukkan bagaimana akuntabilitas keuangan dan SPIP terhadap kemandirian pada tahun tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas keuangan dan efektivitas SPIP memiliki dampak positif terhadap kemandirian daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, dengan menerapkan pelatihan intensif bagi aparat pemerintah daerah mengenai tata kelola keuangan yang baik dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas data keuangan. Dengan adanya akuntabilitas dan SPIP yang kuat, masyarakat dan investor akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah daerah. Ini dapat mendorong investasi lokal yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kemandirian finansial.

Daftar Pustaka

- Agustina, I., Titisari, K. H., & Mursito, B. (2024). Akuntabilitas Laporan Keuangan Ditinjau Dari. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 5(2), 370–387.
- Akhmad, Romadhoni, B., & Diana, F. (2020). *Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan*. July.
- Dewi, C. K., Ikbal, M. A., & Moh, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 57–64.
- Dzulkifli, M., Furqan, A. C., & Betty. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bencana. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 9–18.
- Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing Regional Finance Independence in Indonesian Local Governments. *European Journal of Business and Management Research*, 5(1). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.1.178>
- Groves, S. M., Godsey, W. M., & Shulman, M. A. (1981). Financial indicators for local government. *Public Budgeting & Finance*, 1(2), 5–19.
- Halim, A. (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi Kesatu. *Jogjakarta: UPP AMP YKPN*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah*. 232.

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. *Jakarta: Salemba Empat*, 128.
- Hamid, A., Garusu, I. A., Rauf, D. M., Breemer, J., & Sultraeni, W. (2022). Jurnal Mirai Management Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 239–254. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>
- Hendrawan, S., Anisah, N., & Nafidah, L. N. (2019). Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 12(2), 227–236. <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.12150>
- Hendri, W., & Utama, M. S. (2019). Analysis of Factors That Influence the Independence of Regional Finance in West Nusa Tenggara Province. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 89(5), 169–175. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-05.20>
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 419–433. <https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1965>
- Jatmiko, B., Haya, B. S., & Utami, T. P. (2022). Enhancing Value for Money Government Organizations: *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 245–259. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.22143>
- Jensen, M. C. (2005). Reflections on the State of Accounting Research and the Regulation of Accounting. *SSRN Electronic Journal*, 1976, 11–19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.321522>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Also published in Foundations of Organizational Strategy. *Journal of Financial Economics*, 4, 305–360. <http://ssrn.com/abstract=94043> Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=94043> <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Jurana, J., Indriasari, R., Totanan, C., Parwati, N. M. S., Mayapada, A. G., & Pakawaru, M. I. (2022). Basic environmental accountability in the yadnya ceremony in Malakosa Village, Indonesia. *AMCA Journal of Community Development*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.51773/ajcd.v2i1.89>
- Kholmi, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 7(2), 143. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol7.no2.143-152>
- Maju, S. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 3–15.
- Neltje Meini Rotinsulu, C., Nurnajamuddin, M., & Mas, M. (2021). The Effect Of Budget Participation, Transparency and Internal Control on Accountability and Regional Financial Performance Banggai District. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5, 296–304. www.ajhssr.com
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 623–635.
- Oktaviani, M. A., & Sari, D. P. (2020). Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 186–193.
- Pane, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Perilaku Kecurangan. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 40. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1812>
- Rasmini, N. K., & Masdiantini, P. R. (2018). Fiscal Decentralization, Internal Control System, Accountability of Local Government and Audit Opinion. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan*

Bisnis, 123. <https://doi.org/10.24843/jiab.2018.v13.i02.p06>

Simon, Y. M., Mas'ud, M., & Su'un, M. (2016). the Role of Apparatus Competence, Internal Control System on Good Governance and the Quality of Financial Statement Information. *Researchers World: Journal of Arts, Science and Commerce*, VII(4), 123–132. <https://doi.org/10.18843/rwjasc/v7i4/14>

Wahyuningsih, P., & Kiswanto. (2016). Factors Affecting The Accountability of Village Financial Management. *Accounting Analysis Journal*, 5(3), 139–146.